



DINAMIKA SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA DALAM MEMPENGARUHI PENDAPATAN NELAYAN LOKAL: STUDI KASUS DI KABUPATEN MERAUKE

Guntur¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus
gunturmusamus@gmail.com

Alexander Phuk Tjilen²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus
alexander@unmus.ac.id

Beatus Tambaip³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih
beatus@unmus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya terhadap pendapatan nelayan lokal di Kabupaten Merauke. Pendekatan kualitatif digunakan dengan studi kasus sebagai strategi utama, melibatkan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan nelayan, tokoh adat, serta pihak pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan nelayan tidak semata-mata dipengaruhi oleh aspek ekonomi seperti jumlah tangkapan atau harga jual ikan, melainkan juga ditentukan oleh struktur sosial yang timpang dan nilai-nilai budaya lokal yang kuat. Relasi patron-klien antara nelayan dan pemilik modal menyebabkan ketergantungan ekonomi yang membatasi daya tawar dan kemandirian nelayan, sementara nilai-nilai budaya seperti solidaritas dan aturan adat turut memengaruhi perilaku ekonomi komunitas nelayan. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan sektor perikanan di wilayah pesisir seperti Merauke tidak dapat dilakukan secara parsial atau teknokratis. Diperlukan pendekatan pembangunan yang partisipatif, lintas sektor, dan kontekstual terhadap dinamika sosial-budaya lokal. Pemberdayaan masyarakat nelayan harus mencakup penguatan kelembagaan lokal, reformasi sistem distribusi hasil tangkap, serta pelibatan nilai-nilai budaya dalam strategi peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan perikanan yang berkelanjutan tidak hanya meningkatkan pendapatan nelayan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan identitas budaya masyarakat pesisir

Kata Kunci: Dinamika Sosial; Budaya Lokal; Ekonomi Nelayan; Pendapatan; Kabupaten Merauke

Abstract

This study aims to analyze the effect of social, economic and cultural dynamics on local fishermen's income in Merauke Regency. The qualitative approach is used with a case study as the main strategy, involving field observations, in-depth interviews with fishermen, traditional leaders, and related government. The results showed that fishermen's income was not solely influenced by economic aspects such as the number of fish catches or selling prices, but also determined by lame social structures and strong local cultural values. The patron-



client relations between fishermen and capital owners cause economic dependence that limits the bargaining power and independence of fishermen, while cultural values such as solidarity and customary rules also affect the economic behavior of the fishing community. This finding confirms that the development of the fisheries sector in coastal areas such as Merauke cannot be done partially or technocratically. A participatory, cross-sectoral, and contextual development approach is needed to local socio-cultural dynamics. Empowerment of fishermen communities must include strengthening local institutions, reforms of the capture distribution system, as well as the involvement of cultural values in the strategy of improving welfare. Thus, sustainable fisheries development policies not only increase the income of fishermen economically, but also strengthen the social structure and cultural identity of the coastal community

Keywords: Social Dynamics; Local culture; Fishermen economy; Income; Merauke Regency

Pendahuluan

Kabupaten Merauke merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah. Sebagian besar penduduk di daerah ini menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan dan perikanan, khususnya sebagai nelayan tradisional (Saha et al., 2024). Namun, meskipun sumber daya alam di wilayah ini sangat kaya, kenyataan menunjukkan bahwa kesejahteraan nelayan lokal belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor apa saja yang berperan dalam menentukan pendapatan nelayan dan bagaimana dinamika sosial, ekonomi, dan budaya turut memengaruhi kondisi tersebut.

Secara sosial, struktur dan hubungan antar individu dalam komunitas nelayan di Merauke memengaruhi cara mereka mengakses dan mengelola sumber daya laut. Solidaritas komunal, sistem kepemilikan alat tangkap, hingga praktik tolong-menolong masih menjadi ciri khas masyarakat pesisir di wilayah ini (Fontenele et al., 2024). Namun, nilai-nilai sosial tersebut dapat menjadi pisau bermata dua: di satu sisi mendukung kehidupan bersama, namun di sisi lain dapat membatasi peluang inovasi dan modernisasi dalam praktik penangkapan ikan. Ketimpangan akses terhadap modal sosial seperti jaringan kerja atau informasi pasar juga berpengaruh terhadap distribusi pendapatan antar nelayan.

Menurut (Le Bras et al., 2024) dalam konteks ekonomi, keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar menjadi hambatan utama dalam meningkatkan produktivitas nelayan. Banyak nelayan di Merauke yang masih menggunakan alat tangkap tradisional dan tidak memiliki kapasitas untuk menjangkau wilayah tangkap yang lebih luas. Selain itu, ketergantungan pada tengkulak sebagai perantara pemasaran hasil tangkapan menyebabkan harga jual ikan cenderung tidak menguntungkan bagi nelayan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi yang bersifat struktural dan sistemik (Pedroza-Gutiérrez et al., 2024).

Sementara itu, aspek budaya juga tidak kalah pentingnya dalam memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat nelayan. Kepercayaan adat, norma lokal, serta nilai-nilai budaya yang dipegang teguh oleh komunitas nelayan sering kali menentukan kapan dan bagaimana proses penangkapan ikan dilakukan (Oloko et al., 2024). Misalnya, larangan menangkap ikan di waktu-waktu tertentu atau ritual adat yang



mengatur wilayah tangkap, dapat membatasi intensitas kegiatan ekonomi. Meskipun bernilai luhur, budaya lokal ini terkadang tidak sejalan dengan kebutuhan ekonomi yang menuntut efisiensi dan produktivitas.

Perubahan sosial dan pengaruh eksternal juga turut membentuk dinamika kehidupan masyarakat nelayan. Masuknya teknologi baru, kebijakan pemerintah, dan interaksi dengan pihak luar seperti perusahaan perikanan atau LSM, sering kali menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas (Kılıç, 2024). Proses adaptasi terhadap perubahan ini tidak selalu berjalan mulus dan cenderung menciptakan kerentanan sosial yang berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan nelayan.

Oleh karena itu, studi tentang dinamika sosial, ekonomi, dan budaya menjadi sangat relevan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan nelayan lokal di Merauke. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana ketiga dimensi tersebut saling berinteraksi dan membentuk realitas ekonomi nelayan (Yfantidou et al., 2024). Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini akan menggali secara mendalam konteks lokal, perbedaan antar komunitas nelayan, serta peluang-peluang intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan perikanan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi program pembangunan menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi dan pelestarian budaya (Hampton et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi akademik, tetapi juga praktis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal di Kabupaten Merauke secara berkelanjutan.

Penelitian yang mengkaji Dinamika Sosial Ekonomi dan Budaya dalam Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Merauke memiliki urgensi yang tinggi mengingat kompleksitas permasalahan kesejahteraan nelayan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan ekonomi semata. Selama ini, kebijakan pembangunan sektor perikanan cenderung berfokus pada aspek teknis dan produktivitas, tanpa memperhatikan dimensi sosial dan budaya yang secara signifikan memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat nelayan. Dalam konteks Merauke, menurut (Boateng et al., 2024) yang memiliki kekayaan sumber daya alam laut serta keragaman etnis dan budaya, pendekatan holistik menjadi sangat penting untuk memahami akar permasalahan rendahnya pendapatan nelayan lokal. Dengan mengungkap keterkaitan antara faktor sosial, ekonomi, dan budaya secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan strategi pembangunan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan. Urgensi penelitian ini juga terletak pada perlunya menghindari kebijakan yang bersifat generalisasi dan kurang adaptif terhadap realitas lokal, serta mendorong penguatan kapasitas masyarakat nelayan dalam menghadapi dinamika perubahan zaman tanpa kehilangan identitas budaya mereka.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatannya yang interdisipliner dan kontekstual dalam menganalisis permasalahan pendapatan



nelayan (Ankrah et al., 2024). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti aspek ekonomi seperti produktivitas, akses pasar, atau teknologi penangkapan, penelitian ini mengintegrasikan tiga dimensi utama – sosial, ekonomi, dan budaya – secara simultan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh dan mendalam. Selain itu, fokus pada Kabupaten Merauke sebagai wilayah dengan karakteristik sosial-budaya yang khas dan keberadaan masyarakat adat yang kuat memberikan nilai orisinalitas tersendiri, karena wilayah ini masih relatif sedikit disentuh oleh kajian serupa. Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru dengan menempatkan budaya lokal bukan hanya sebagai warisan tradisional, tetapi sebagai variabel aktif yang berperan dalam proses ekonomi masyarakat pesisir. Dengan demikian, menurut (Ankrah et al., 2024) penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam literatur studi pembangunan perikanan, tetapi juga menyajikan wawasan praktis untuk pengambilan kebijakan yang lebih peka terhadap konteks lokal dan keberagaman masyarakat nelayan di wilayah perbatasan timur Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana dinamika sosial, ekonomi, dan budaya memengaruhi tingkat pendapatan nelayan lokal di Kabupaten Merauke. Penelitian ini bertujuan mengungkap keterkaitan antara struktur sosial, kondisi ekonomi, serta nilai-nilai budaya lokal dalam membentuk perilaku dan strategi ekonomi nelayan, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang yang dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan perikanan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

Kerangka Teori

Dinamika sosial mengacu pada perubahan dan perkembangan dalam struktur, norma, serta interaksi sosial dalam masyarakat (Gelfand et al., 2024). Dalam konteks nelayan lokal, dinamika sosial mencakup perubahan pola hidup, struktur keluarga, serta peran dan hubungan sosial antar anggota komunitas nelayan. Menurut teori interaksionisme simbolik, hubungan sosial yang terbentuk di komunitas nelayan berperan penting dalam menciptakan solidaritas, kerja sama, dan jaringan sosial yang mendukung produktivitas (Cheng et al., 2025). Dinamika sosial juga mempengaruhi cara nelayan mengakses informasi, teknologi, dan pasar, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan (Pedroza-Gutiérrez et al., 2024). Perubahan sosial yang terjadi akibat migrasi, modernisasi alat tangkap, dan perubahan peran gender juga dapat menggeser struktur ekonomi komunitas pesisir.

Pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang mencakup ketersediaan modal, harga jual hasil tangkapan, biaya operasional, serta akses terhadap pasar dan lembaga keuangan. Teori ekonomi mikro menjelaskan bagaimana nelayan sebagai pelaku ekonomi membuat keputusan rasional untuk memaksimalkan pendapatan dengan mempertimbangkan biaya dan keuntungan (Letschert et al., 2025). Selain itu, ketergantungan terhadap cuaca, fluktuasi harga ikan, dan kompetisi pasar juga menjadi variabel yang mempengaruhi pendapatan secara signifikan. Akses terhadap bantuan pemerintah, subsidi BBM, serta koperasi nelayan juga menjadi faktor penting yang memperkuat posisi ekonomi nelayan dalam menghadapi tantangan eksternal.



Budaya merupakan sistem nilai, kepercayaan, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, termasuk komunitas nelayan (Bi, 2024). Nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, kearifan lokal dalam membaca musim, serta ritual adat sebelum melaut menjadi bagian dari identitas dan cara hidup nelayan. Berdasarkan teori antropologi budaya, perilaku ekonomi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan rasional tetapi juga oleh nilai-nilai budaya yang mengakar (Yilmaz, 2024). Budaya kerja, etos nelayan, dan cara pandang terhadap laut sebagai ruang hidup memiliki pengaruh dalam menentukan frekuensi melaut, teknik penangkapan, dan pembagian hasil tangkapan. Oleh karena itu, budaya lokal berperan dalam membentuk perilaku ekonomi dan, secara tidak langsung, mempengaruhi pendapatan nelayan.

Pendapatan nelayan merupakan hasil bersih yang diperoleh setelah dikurangi biaya produksi dari aktivitas penangkapan ikan. Pendapatan ini tidak hanya mencerminkan kesejahteraan ekonomi individu nelayan, tetapi juga menjadi indikator bagi keberlanjutan ekonomi pesisir. Teori kesejahteraan menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan berhubungan langsung dengan kualitas hidup, akses pendidikan, dan kesehatan keluarga nelayan (Putri et al., 2024). Faktor-faktor seperti efisiensi alat tangkap, frekuensi melaut, dukungan sosial, dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan lingkungan laut turut memengaruhi fluktuasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan nelayan dipengaruhi secara kompleks oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, (Calzari et al., 2024) untuk memahami secara mendalam dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi pendapatan nelayan lokal di Kabupaten Merauke. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena yang kompleks dan kontekstual, di mana aspek-aspek sosial dan budaya tidak dapat dijelaskan hanya melalui data kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menangkap makna, nilai, serta interpretasi masyarakat nelayan terhadap realitas kehidupan mereka sehari-hari. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, (Hunziker & Blankenagel, 2024) dengan fokus utama pada beberapa kampung nelayan yang representatif di wilayah pesisir Kabupaten Merauke. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap unit analisis yang spesifik, dengan mempertimbangkan konteks geografis, sosial, dan budaya yang unik. Pemilihan lokasi studi dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria tertentu, seperti dominasi mata pencaharian sebagai nelayan, keberadaan komunitas adat, serta variasi dalam akses terhadap pasar dan infrastruktur ekonomi.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan nelayan lokal, tokoh masyarakat, aparat desa, serta pihak-pihak terkait seperti koperasi perikanan atau lembaga pendamping. Observasi dilakukan untuk memahami praktik keseharian nelayan di laut maupun di darat, serta untuk melihat bagaimana nilai-nilai budaya dan sosial terwujud dalam aktivitas ekonomi mereka. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari sumber resmi seperti laporan dinas kelautan, statistik daerah, serta



literatur terdahulu. Teknik pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling dengan pendekatan snowball (Bouncken et al., 2025), yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui secara mendalam dinamika kehidupan nelayan, kemudian direkomendasikan oleh informan sebelumnya. Informan utama terdiri dari nelayan lokal dengan berbagai latar belakang (usia, etnis, kepemilikan alat tangkap), sedangkan informan pendukung meliputi tokoh adat, penyuluh perikanan, dan pelaku pasar lokal. Pemilihan informan dilakukan hingga mencapai titik jenuh data (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh mulai berulang dan tidak memberikan temuan baru.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis tematik, yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi ditranskrip, dikoding, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian, seperti struktur sosial, pola ekonomi, serta nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan pendapatan nelayan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, dapat dipercaya, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Secara keseluruhan, metode ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana interaksi antara dinamika sosial, ekonomi, dan budaya secara nyata membentuk struktur dan fluktuasi pendapatan nelayan lokal di Merauke. Dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal dan keberagaman budaya, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi kontribusi ilmiah, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan kebijakan pembangunan sektor perikanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah pesisir Indonesia Timur.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan nelayan lokal di Kabupaten Merauke sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan erat. Secara sosial, hubungan patron-klien antara nelayan dan pemilik modal (toke) masih sangat kuat dan membatasi kemandirian ekonomi nelayan kecil. Sebagian besar nelayan bekerja secara harian atau sistem bagi hasil, tanpa memiliki akses terhadap aset produktif seperti kapal dan alat tangkap modern. Relasi sosial yang hierarkis ini menyebabkan ketergantungan ekonomi yang berdampak langsung pada rendahnya pendapatan bersih nelayan.

Tabel 1. Status Kepemilikan Alat Tangkap Nelayan

Status Kepemilikan	Jumlah Nelayan	Persentase (%)
Milik Sendiri	12	24%
Sewa/ Bagi Hasil	25	50%
Dipinjam dari Toke	13	26%

Secara ekonomi, hasil tangkapan yang diperoleh nelayan tidak selalu berbanding lurus dengan pendapatan bersih karena harga jual ikan yang fluktuatif dan biaya operasional yang tinggi, terutama bahan bakar. Selain itu, akses pasar yang terbatas membuat nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan kepada tengkulak



dengan harga yang lebih rendah. Beberapa nelayan menyatakan bahwa dalam seminggu mereka hanya memperoleh penghasilan bersih rata-rata Rp300.000 – Rp500.000, jauh dari standar pendapatan layak.

Tabel 2. Rata-rata Tangkapan dan Pendapatan Bersih Berdasarkan Jenis Alat Tangkap

Jenis Alat Tangkap	Rata-rata Tangkapan (kg/minggu)	Rata-rata Pendapatan Bersih (Rp/minggu)
Pancing Tradisional	25 kg	Rp350.000
Jaring Gillnet	40 kg	Rp600.000
Bubu	18 kg	Rp280.000

Dari aspek budaya, penelitian menemukan bahwa norma adat dan kepercayaan lokal berperan dalam mengatur waktu melaut, wilayah tangkap, dan distribusi hasil. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat Marind, terdapat larangan melaut pada hari-hari tertentu atau sebelum pelaksanaan ritual adat tahunan. Walaupun nilai-nilai ini menjaga keseimbangan ekologi, dalam praktiknya juga mengurangi frekuensi kerja dan peluang memperoleh penghasilan lebih. Selain itu, norma budaya kolektif sering kali menyebabkan hasil tangkapan dibagi secara merata tanpa mempertimbangkan kontribusi kerja, yang dalam beberapa kasus menurunkan motivasi kerja individu.

Sebagian besar informan juga mengungkapkan bahwa keberadaan LSM dan program pemerintah belum menyentuh kebutuhan mendasar nelayan secara berkelanjutan. Program bantuan alat tangkap, misalnya, tidak disertai pelatihan atau pembinaan, sehingga tidak semua alat dapat dimanfaatkan secara optimal. Adanya kesenjangan antara pendekatan program dengan kebutuhan riil masyarakat menunjukkan bahwa intervensi ekonomi semata tidak cukup tanpa memperhatikan konteks sosial-budaya lokal.

Tabel 3. Persepsi nelayan terhadap efektivitas program bantuan pemerintah

Jenis Bantuan	Jumlah Responden yang Merasa Efektif	Jumlah Responden yang Tidak Efektif
Bantuan Alat Tangkap	10	22
Pelatihan Kewirausahaan	5	27
Akses Kredit Mikro	8	24

Dari keseluruhan hasil ini, terlihat bahwa dinamika sosial-ekonomi dan budaya bukan hanya sebagai latar belakang kehidupan nelayan, tetapi justru sebagai faktor utama yang menentukan kapasitas produksi dan distribusi pendapatan. Upaya peningkatan kesejahteraan nelayan harus mempertimbangkan model pembangunan yang partisipatif, berbasis komunitas, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam strategi ekonomi yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dinamika sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan memengaruhi pendapatan nelayan lokal di Kabupaten Merauke.



Ketiganya saling berinteraksi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pendapatan nelayan tidak dapat dimaknai sekadar sebagai hasil akhir dari aktivitas ekonomi, melainkan sebagai refleksi dari kondisi sosial dan kultural yang melingkupinya. Oleh karena itu, pendekatan struktural dan kultural menjadi kunci utama dalam menganalisis fenomena ini secara komprehensif. Dari aspek sosial, relasi antara nelayan dengan pemilik modal memperlihatkan pola ketergantungan yang menempatkan nelayan dalam posisi subordinat. Ketergantungan ini terjadi karena keterbatasan kepemilikan alat tangkap dan modal kerja, yang membuat banyak nelayan hanya mampu bekerja berdasarkan sistem bagi hasil atau pinjam alat dari toke. Dalam kerangka teori relasi patron-klien (Biermann, 2025), struktur sosial seperti ini menciptakan ketimpangan kekuasaan dan mempengaruhi tingkat kemandirian ekonomi masyarakat nelayan.

Fenomena tersebut selaras dengan konsep *power asymmetry* dalam teori struktur sosial (He et al., 2024), yang menunjukkan bahwa kelompok dengan akses terhadap sumber daya ekonomi (kapal, jaring, pasar) akan memiliki kontrol lebih besar atas kelompok lain yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya tersebut. Dalam kasus nelayan di Merauke, struktur sosial ini tidak hanya menciptakan ketimpangan ekonomi, tetapi juga membatasi ruang gerak sosial nelayan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Dalam praktiknya, sistem bagi hasil yang berlaku cenderung menguntungkan pemilik modal karena penetapan pembagian hasil sering kali tidak transparan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya sistem pencatatan atau kontrak kerja yang jelas. Ketika nelayan mengalami kerugian akibat cuaca buruk atau tangkapan minim, beban operasional tetap ditanggung bersama, sementara ketika mendapat hasil besar, distribusi tidak selalu adil. Ini menunjukkan bahwa aspek sosial-ekonomi sangat erat berkaitan dan tidak dapat dilihat secara parsial.

Secara ekonomi, masalah mendasar yang dihadapi nelayan Merauke berkaitan dengan produktivitas rendah, akses terbatas ke pasar, serta tingginya biaya operasional. Pendapatan nelayan sangat fluktuatif, bergantung pada musim, kondisi cuaca, dan ketersediaan ikan. Dalam seminggu, sebagian besar nelayan hanya memperoleh penghasilan bersih antara Rp300.000 hingga Rp500.000, yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak, apalagi untuk menabung atau berinvestasi. Keterbatasan akses terhadap teknologi tangkap yang efisien menjadi salah satu penyebab rendahnya hasil tangkapan. Alat tangkap tradisional seperti pancing dan bubu masih banyak digunakan (Mushtaq et al., 2024), yang secara kuantitas jauh tertinggal dibanding alat modern seperti jaring tarik atau rawai. Minimnya pelatihan atau program peningkatan kapasitas dari pemerintah menyebabkan nelayan tetap berada dalam pola produksi konvensional yang kurang efisien.

Selain itu, akses pasar yang lemah membuat nelayan sangat tergantung pada tengkulak sebagai perantara utama. Harga ikan ditentukan sepihak, sering kali jauh di bawah harga pasar sebenarnya. Tidak adanya kelembagaan pasar atau koperasi yang kuat membuat nelayan tidak memiliki daya tawar. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penguatan struktur ekonomi lokal, seperti koperasi nelayan atau akses langsung ke pasar regional. Dalam konteks budaya, nilai-nilai lokal seperti solidaritas, kerja kolektif, dan aturan adat memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat. Pada masyarakat Marind dan suku-suku pesisir lainnya, masih



berlaku aturan adat yang melarang aktivitas melaut pada hari-hari tertentu, atau membatasi wilayah tangkap berdasarkan zona adat. Secara ekologis, aturan ini bermanfaat dalam menjaga kelestarian sumber daya, namun secara ekonomi bisa mengurangi frekuensi melaut dan pendapatan harian.

Nilai budaya kolektif juga tampak dalam cara pembagian hasil tangkapan yang lebih mempertimbangkan keadilan sosial daripada logika kontribusi kerja. Dalam beberapa kasus, hasil tangkapan dibagi rata antar anggota kelompok meskipun kontribusi tiap individu berbeda. Ini menunjukkan adanya nilai egalitarianisme dalam budaya lokal, namun juga berpotensi menurunkan insentif kerja individu dalam jangka panjang. Teori *embeddedness* dari (Hou et al., 2024) menjelaskan bagaimana tindakan ekonomi masyarakat tidak pernah lepas dari struktur sosial dan nilai budaya. Dalam konteks ini, pilihan ekonomi nelayan tidak selalu rasional dalam perspektif ekonomi neoklasik, karena terikat oleh norma, ritual, dan kebiasaan sosial yang mengatur kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, program intervensi ekonomi yang tidak memahami kerangka budaya ini sering kali gagal memberikan hasil yang berkelanjutan.

Program bantuan dari pemerintah atau LSM selama ini lebih banyak berfokus pada aspek teknis, seperti distribusi alat tangkap atau pelatihan singkat. Namun, banyak dari program tersebut tidak memperhitungkan kondisi sosial-budaya masyarakat sasaran. Akibatnya, bantuan yang diberikan tidak dimanfaatkan secara maksimal, bahkan dalam beberapa kasus justru menimbulkan ketergantungan baru. Sebagai contoh, bantuan alat tangkap modern tanpa pelatihan penggunaannya hanya membuat nelayan bergantung pada pihak ketiga. Sementara pelatihan kewirausahaan yang berbasis pada logika pasar modern tidak selalu relevan bagi masyarakat dengan nilai hidup kolektif dan subsisten. Ini menunjukkan perlunya pendekatan pembangunan yang kontekstual dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Lebih lanjut, temuan di lapangan menunjukkan bahwa nelayan tidak sepenuhnya pasif atau apatis terhadap perubahan. Sebagian dari mereka memiliki strategi adaptif seperti berganti profesi musiman (misalnya menjadi petani atau buruh), mengembangkan usaha rumah tangga, atau menjalin relasi dagang informal dengan komunitas luar. Namun, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi menghambat kemampuan mereka untuk melakukan transformasi ekonomi secara mandiri.

Pentingnya penguatan kelembagaan lokal juga menjadi catatan penting dari penelitian ini. Kehadiran koperasi nelayan atau lembaga adat yang berfungsi sebagai perantara ekonomi bisa menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Namun, koperasi yang ada masih lemah secara manajerial dan minim dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Dari sudut pandang pembangunan, pendekatan yang bersifat *top-down* terbukti kurang efektif di wilayah-wilayah dengan kekhasan budaya seperti Merauke. Sebaliknya, pendekatan *bottom-up* berbasis komunitas, yang melibatkan tokoh adat, perempuan nelayan, dan generasi muda dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, lebih menjanjikan keberlanjutan dan penerimaan sosial.

Teori *Participatory Development* yang dikemukakan oleh (Hayvon, 2025) menekankan pentingnya pemberdayaan lokal sebagai inti dari pembangunan. Dalam konteks Merauke, pendekatan ini berarti memberikan ruang kepada komunitas



nelayan untuk mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri, mengelola sumber daya mereka, dan mengembangkan strategi adaptasi berdasarkan kekuatan lokal. Dengan mempertimbangkan dinamika sosial-budaya dan ekonomi tersebut, strategi pembangunan sektor perikanan di Merauke sebaiknya tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada transformasi struktural dan kultural. Ini mencakup reformasi sistem distribusi hasil tangkap, penguatan kapasitas kelembagaan, dan revitalisasi peran budaya dalam mendukung ekonomi berkelanjutan.

Pendekatan multisektor yang melibatkan dinas perikanan, pendidikan, koperasi, dan lembaga adat secara terpadu akan jauh lebih efektif daripada program sektoral yang terpisah-pisah. Integrasi lintas sektor ini penting untuk menjawab kompleksitas masalah pendapatan nelayan yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan berbagai aspek kehidupan sosial. Sebagai penutup pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan nelayan di Kabupaten Merauke hanya dapat dicapai jika strategi pembangunan memperhatikan konteks sosial dan budaya lokal. Upaya teknokratis semata tidak cukup. Diperlukan perubahan paradigma dari pembangunan yang bersifat intervensi menjadi pembangunan yang berbasis dialog, partisipasi, dan penguatan lokalitas. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya meningkatkan angka pendapatan, tetapi juga memperkuat kemandirian dan martabat masyarakat nelayan itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nelayan lokal di Kabupaten Merauke dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan erat. Ketergantungan terhadap pemilik modal, keterbatasan akses terhadap teknologi dan pasar, serta kuatnya nilai-nilai budaya lokal seperti kerja kolektif dan aturan adat, membentuk pola kerja dan distribusi pendapatan yang kompleks. Rendahnya kemandirian ekonomi nelayan bukan hanya karena kurangnya sarana produksi, tetapi juga karena struktur sosial yang timpang dan pendekatan pembangunan yang tidak kontekstual. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan nelayan memerlukan pendekatan holistik yang memberdayakan komunitas secara sosial, menguatkan kelembagaan ekonomi lokal, dan menghargai nilai-nilai budaya dalam setiap kebijakan pembangunan.

Referensi

- Ankrah, J., Monteiro, A., & Madureira, H. (2024). Using qualitative research methods to understand how climate variability impacts the livelihoods of fishermen in coastal Ghana. *Maritime Studies*, 23(3), 40.
- Bi, X. (2024). Cultural Inheritance and Protection of Traditional Villages: A Perspective of Philosophy and Cultural Values. *Cultura: International Journal of Philosophy of Culture and Axiology*, 21(3).
- Biermann, R. (2025). Conceptualising patron-client relations in secessionist conflict. A research agenda. *Territory, Politics, Governance*, 13(1), 9–27.
- Boateng, J. K., Golo, H. K., Ibrahim, S., & Erinosh, B. T. (2024). Reconciling conflicts between cultural beliefs, and human rights standards in coastal communities of Ghana: preserving cultural rights and promoting sustainable fishing practices.



- Cogent Social Sciences*, 10(1), 2340427.
- Bouncken, R. B., Czakon, W., & Schmitt, F. (2025). Purposeful sampling and saturation in qualitative research methodologies: recommendations and review. *Review of Managerial Science*, 1-37.
- Calzari, S., Villa, M., Mauro, S., Mirto, V., Bulloni, P., Zini, P., Deelen, P., Grassellini, P. R., Bernasconi, S., & Cassina, T. (2024). The intensive care unit diary as a valuable care tool: A qualitative study of patients' experiences. *Intensive and Critical Care Nursing*, 80, 103558.
- Cheng, Y., Fei, X., Luo, L., Kong, X., & Zhang, J. (2025). Social network analysis of heterogeneous subjects driving spatial commercialization of traditional villages: A case study of Tanka Fishing Village in Lingshui Li Autonomous county, China. *Habitat International*, 155, 103235.
- Fontenele, R. E. S., Ribeiro, F. W., Cavalcante, M. R. A., & Ribeiro, D.-A. L. B. (2024). Small-scale fisheries as a common good and a social and solidarity economy practice. *Marine Policy*, 168, 106305.
- Gelfand, M. J., Gavrillets, S., & Nunn, N. (2024). Norm dynamics: Interdisciplinary perspectives on social norm emergence, persistence, and change. *Annual Review of Psychology*, 75(1), 341-378.
- Hampton, M., O'Hara, S., & Gearin, E. (2024). Assessing restorative community development frameworks—a meso-level and micro-level integrated approach. *Sustainability*, 16(5), 2061.
- Hayvon, J. C. (2025). Participatory Theory Building: A Methodological Review and Conceptualization. *American Journal of Health Education*, 1-12.
- He, J., Lin, Y., Hooimeijer, P., & Monstadt, J. (2024). Measuring social network influence on power relations in collaborative planning: A case study of Beijing City, China. *Cities*, 148, 104866.
- Hou, B., Jin, P., Tang, X., Hong, J., & Zhou, P. (2024). The internal determinants of innovation efficiency in Chinese universities: A perspective from embeddedness theory. *Research in Higher Education*, 65(7), 1679-1713.
- Hunziker, S., & Blankenagel, M. (2024). Cross-sectional research design. In *Research design in business and management: A practical guide for students and researchers* (pp. 187-199). Springer.
- Kılıç, A. O. (2024). Seychelles blue bond: Indebting ecological restructuring of fisheries. *Marine Policy*, 163, 106144.
- Le Bras, Q., Gascuel, D., Quemper, F., & Levrel, H. (2024). Transition and adaptation: An analysis of how professional fishermen change their practices. *Marine Policy*, 164, 106154.
- Letschert, J., Müller, B., Dressler, G., Möllmann, C., & Stelzenmüller, V. (2025). Simulating fishery dynamics by combining empirical data and behavioral theory. *Ecological Modelling*, 501, 111036.
- Mushtaq, S. T., Jamwal, A., Mushtaq, S. A., Shah, T. H., & Bhat, F. A. (2024). Sport Fishing Gears and Equipment. In *Angling in India* (pp. 191-205). Springer.
- Oloko, A., Harper, S., Fakoya, K., & Sumaila, U. R. (2024). The multi-dimensional



perspectives of taboos on gender roles of fisherfolk in the Global South. *Maritime Studies*, 23(1), 1.

- Pedroza-Gutiérrez, C., Solano, N., Fernández-Rivera-Melo, F., & Hernández-Herrera, I. (2024). What are the factors that enable or hinder gender equality? Lessons and experiences on gender dynamics in Mexican small-scale fisheries. *Marine Policy*, 159, 105944.
- Putri, R. S. W., Banowati, E., Utomo, C. B., Hayati, R., & Septiani, E. (2024). The Role of Basic Education In Improving The Quality of Life of Fisherman Families In Ujungalang Village, Kampung Laut District, Cilacap. *International Conference on Science, Education, and Technology*, 10, 127–134.
- Saha, D., Kumar, D. S., Krishnan, P., Mukherjee, R., Vidhyavathi, A., Maheswari, M., & Vijayabhama, M. (2024). Balancing Nets and Lives: A Socio-Ecological Analysis of Sustainable Fisheries on the Indian Coast of the Gulf of Mannar. *Sustainability*, 16(20), 8738.
- Yfantidou, G., Yfantidou, S., Karanatsiou, D., Liontakis, A., Maniopoulou, M., Balaska, P., Papaioannou, A., & Vassilopoulou, V. (2024). Experience Economy Perspective on Recreational Fishing Tourism Travelers' Reviews: A Data Science Approach. *Tourism and Hospitality*, 5(2), 354–380.
- Yilmaz, I. (2024). Exploring the foundations of Islamic moral economy: a return to substantive morality. *International Journal of Ethics and Systems*.